

KEBIJAKAN KEUANGAN INKLUSIF DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Efrita Norman  
Program Studi Pendidikan Agama Islam  
Program Pascasarjana  
Institut Agama Islam Nasional (IAI-N) Laa Roiba Bogor  
[efritanorman@mes-bogoraya.net](mailto:efritanorman@mes-bogoraya.net)

**ABSTRACT**

*This study aims to explore inclusive financial policies in the perspective of Islamic economics. The method used is a qualitative method with a literacy study and mass media analysis approach. Hasilnuya, Indonesia (BI) as the monetary authority believes the NSFJ program as the main way to improve financial literacy in order to increase the ability of individuals to manage their finances. The banking sector as the majority of financial services activities in Indonesia is a front liner for the program. The strategies used in achieving financial inclusion goals include five pillars, namely financial education, increasing financial eligibility, supporting regulations, increasing intermediation facilitation, and policy reforms covering customer protection, banking agents, and phone banking. Going forward, the financial industry needs to map the potential of the community and business sector as targets of the financial inclusion program. For this reason, a comprehensive partisanship and strategy from the financial industry is needed to expand access to services for the community, especially in preparing products that can meet the savings and investment needs of the community.*

**Keywords:** Bank Indonesia, Islamic economics, financial inclusion, monetary authority.

**نبذة مختصرة**

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف السياسات المالية الشاملة من منظور الاقتصاد الإسلامي. الطريقة المستخدمة هي طريقة نوعية مع دراسة محو الأمية ونهج تحليل وسائل الإعلام Hasilnuya، إندونيسيا (BI)، إندونيسيا (BI) باعتبارها السلطة النقدية تعتقد أن برنامج NSFJ هو الوسيلة الرئيسية لتحسين المعرفة المالية من أجل زيادة قدرة الأفراد على إدارة شؤونهم المالية. يعد القطاع المصرفي باعتباره غالبية أنشطة الخدمات المالية في إندونيسيا الخطوط الأمامية للبرنامج. تشمل الاستراتيجيات المستخدمة في تحقيق أهداف الإدماج المالي خمس ركائز، وهي التعليم المالي، وزيادة الأهلية المالية، واللوائح الداعمة، وزيادة تسهيل الوساطة، وإصلاحات السياسة التي تغطي حماية العملاء، والوكلاء المصرفيين، والخدمات المصرفية عبر الهاتف. للمضي قدماً، تحتاج الصناعة المالية إلى تحديد إمكانات المجتمع وقطاع الأعمال كأهداف لبرنامج الشمول المالي. لهذا السبب، هناك حاجة إلى استراتيجية واستراتيجية شاملة من الصناعة المالية لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات للمجتمع، خاصة في إعداد المنتجات التي يمكن أن تلبي احتياجات المدخرات والاستثمار للمجتمع.

الكلمات المفتاحية: بنك إندونيسيا، الاقتصاد الإسلامي، الشمول المالي، السلطة النقدية.

**ABSTRAK**

Kajian ini bertujuan mengeksplorasi kebijakan keuangan inklusif dalam perspektif ekonomi syariah. Metode yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literasi dan analisis media massa. Hasilnuya, Indonesia (BI) selaku otoritas moneter meyakini program NSFJ sebagai cara utama untuk

meningkatkan financial literacy guna peningkatan kemampuan individu dalam mengelola keuangannya. Sektor perbankan sebagai mayoritas kegiatan jasa keuangan di Indonesia menjadi frontliner bagi program tersebut. Strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan financial inclusion meliputi lima pilar, yaitu edukasi keuangan, meningkatkan eligibilitas keuangan, regulasi yang mendukung, peningkatan fasilitasi intermediasi, serta reformasi kebijakan yang meliputi perlindungan nasabah, agen banking, dan phone banking. Ke depan, industry keuangan perlu memetakan potensi masyarakat dan sektor usaha sebagai target dari program financial inclusion. Untuk itu, dibutuhkan keberpihakan dan strategi yang komprehensif dari industri keuangan untuk memperluas akses layanan jasa bagi masyarakat, utamanya dalam mempersiapkan produk-produk yang dapat memenuhi kebutuhan tabungan dan investasi bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Bank Indonesia, ekonomi syariah, inklusi keuangan, otoritas moneter.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang telah disahkan oleh DPR pada tanggal 11 Desember 2012. Kelahiran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dilatarbelakangi oleh dominasi lembaga-lembaga keuangan makro yang menguasai roda perekonomian di Indonesia. Lembaga Keuangan Makro ini memiliki modal yang besar dan digerakkan dengan system yang rumit, sehingga masyarakat menengah ke bawah kesulitan mengakses dana-dana dari lembaga keuangan makro. Kendala yang dihadapi masyarakat menengah ke bawah adalah biasanya terkait system administrasi, produk lembaga makro yang tidak sesuai dengan pelaku usaha kecil (UKM), anggapan berlebihan bahwa UKM memiliki risiko tinggi dan adanya keharusan agunan (jaminan) dalam pinjaman. Sedangkan masyarakat bawah seperti petani, ibu rumah tangga, nelayan, buruh dan kelompok rentan lainnya biasanya berpendidikan rendah sehingga sulit dipaksa mengikuti standar administrasi yang rumit sebagaimana diharuskan oleh system keuangan makro seperti bank-bank konvensional.

Salah satu isu aktual dalam industry perbankan dan keuangan nasional saat ini adalah *financial inclusion*. Visi dari program *financial inclusion* diarahkan untuk mewujudkan akses seluas-luasnya kepada layanan jasa keuangan, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan di Indonesia. Program National Strategy Inclusion (NSFI) di Indonesia sesungguhnya telah dicanangkan bank sentral sejak 2010. Bahkan, sejak 1965, Indonesia sendiri sudah lama melaksanakan program yang dapat dikategorikan sebagai *financial inclusion*, yaitu program pengkreditan untuk mendorong peningkatan pangan sekaligus menanggulangi kemiskinan.

Mengacu survei *World Bank* tahun 2009, sekitar 32% atau 76 juta penduduk Indonesia belum tersentuh jasa keuangan (*financially excluded*) dan sekitar 60-70 persen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) belum memiliki akses terhadap perbankan. *Financial inclusion* menjadi andalan bank sentral sebagai metode mengurangi tingkat kemiskinan Indonesia melalui peningkatan kemampuan individu dalam mengelola keuangannya. Konsep ini mengajak masyarakat untuk

mengelola uang dan waktunya agar lebih produktif sehingga hasilnya dapat ditabung dan pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan. Tabel 1 menunjukkan tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia tahun 2011 lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi. Mengacu pada target yang diproyeksikan, secara bertahap, hingga tahun 2014 diharapkan tingkat pengangguran akan turun dibawah pertumbuhan ekonomi. Sedangkan tingkat kemiskinan, meski belum dapat berada di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan terjadi penurunan dibawah satu digit.

Tabel 1 : Target Indikator Makro pada RPJMN 2010 - 2014

Sumber : Brodjonegoro (2012)

Seluruh sektor keuangan, utamanya perbankan, harus memetakan potensi masyarakat dan sektor usaha yang menjadi sasaran dari program *financial inclusion*. Apalagi, seiring dengan bertambahnya jumlah masyarakat kelas menengah serta masih dominannya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum mengakses perbankan, maka dibutuhkan keberpihakan dan strategi yang komprehensif dari industri keuangan untuk memperluas akses layanan jasa bagi masyarakat, utamanya dalam mempersiapkan produk-produk yang dapat memenuhi kebutuhan tabungan dan investasi bagi masyarakat.

Tabel 2 menunjukkan jumlah usaha dan kontribusi lapangan kerja di Indonesia berdasarkan Sensus Ekonomi 2006. Usaha mikro mendominasi seluruh sektor usaha sebesar 83.25% dengan jumlah pekerja di dalamnya sehingga 62.51%. Berikutnya sektor usaha kecil menguasai 15.78% dengan jumlah pekerja di dalamnya sekitar 21.36%. Lalu disusul secara berturut-turut sektor usaha menengah dan sektor usaha besar.

Tabel 2 : Jumlah usaha dan Kontribusi Lapangan Kerja

Kategori	Jumlah Usaha	Persentase Usaha (%)	Jumlah Pekerja	Persentase Pekerja (%)
<b>Usaha Mikro</b>	<b>18,928,220</b>	<b>83.25</b>	<b>31,047,663</b>	<b>62.51</b>
Permanen	10,336,514	45.46	21,447,768	43.18
Tidak Permanen	8,591,706	37.79	9,599,895	19.33
<b>Usaha Kecil</b>	<b>3,587,574</b>	<b>15.78</b>	<b>10,608,535</b>	<b>21.36</b>
Permanen	2,400,168	10.56	8,942,571	18.00
Tidak Permanen	1,187,406	5.22	1,665,964	3.35
<b>Usaha Menengah</b>	<b>164,839</b>	<b>0.72</b>	<b>3,050,067</b>	<b>6.14</b>
Permanen	160,205	0.70	3,038,318	6.12
Tidak Permanen	4,634	0.02	11,749	0.02
<b>Usaha Besar</b>	<b>44,048</b>	<b>0.19</b>	<b>4,761,776</b>	<b>9.59</b>
Permanen	43,459	0.19	4,760,083	9.58
Tidak Permanen	589	0.00	1,693	0.00
<b>Tidak Dapat Diklasifikasikan</b>	<b>12,107</b>	<b>0.05</b>	<b>202,126</b>	<b>0.41</b>
Permanen	12,107	0.05	202,126	0.41
Tidak Permanen	0	0.00	0	0.00
<b>Jumlah</b>	<b>22,736,788</b>	<b>100.00</b>	<b>49,670,167</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Sensus Ekonomi (2006)

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah adalah adanya kebijakan keuangan inklusif. Hal ini untuk menjawab akan problem mengenai system keyangan yang masih belum optimal menjangkau semua lapisan masyarakat terutama kalangan miskin, hampir miskin dan kelompok rentan lainnya. Dengan adanya kebijakan keuangan inklusif ini diharapkan dapat memperluas lapangan kerja dan berperan sebagai instrument pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.

## KAJIAN LITERATUR

### Literasi Keuangan

Ilmu keuangan merupakan ilmu dinamis. Prakteknya menjadi keseharian bagi setiap orang. Literasi keuangan menjadi keniscayaan bagi setiap orang untuk dapat membuat keputusan keuangan serta mengoptimalkan instrument dan produk keuangan yang tersedia. Secara sederhana, literasi keuangan adalah pengetahuan mengenai konsep-konsep dasar keuangan. Literasi keuangan mencakup beberapa aspek dalam keuangan, yaitu pengetahuan dasar mengenai keuangan pribadi (*basic personal finance*), manajemen uang (*money management*), manajemen kredit dan utang (*credit and debt management*), tabungan dan investasi (*saving and investment*), serta manajemen risiko (*risk management*).

Ketika krisis keuangan global melanda dunia, salah satu pemikiran yang mengemuka di kalangan para ekonom adalah apakah penerapan system ekonomi syariah merupakan solusi bagi masalah ini dan apakah ekonomi syariah akan menjadi paradigm baru yang menggantikan system ekonomi kapitalis. Bagi sejumlah ekonom, krisis global yang tengah terjadi saat ini merupakan pembuktian lemahnya system ekonomi kapitalis sekaligus menjadi momentum kebangkitan ekonomi syariah. Fenomena ini, jika dikaji dengan pendekatan konsep *new institutional economics* (NIE), pandangan tersebut mendekati kebenaran.

Khalifah Umar bin Khattab pernah mengatakan, "*Siapa saja yang memiliki uang, hendaklah ia menginvestasikannya. Dan siapa saja yang memiliki tanah, hendaklah ia menanaminya.*" Diriwayatkan pula dari A'isyah r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda : "*Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang tidak menjadi milik seseorang, maka ia lebih berhak (atas tanah itu).*" Hal inin secara keseluruhan menunjukkan bahwa ekonomi Islam mengajarkan agar seluruh komponen modal dapat digunakan pada kegiatan produktif dalam rangka menggerakkan perekonomian dan mendorong *velocity of money*.

Pemikiran Ibnu Khaldun pun pernah menyatakan bahwa kekayaan bangsa-bangsa tidak ditentukan oleh jumlah uang yang dimiliki bangsa tersebut, tetapi ditentukan oleh produksi barang dan jasanya serta neraca pembayaran yang sehat, di mana neraca pembayaran yang sehat adalah konsekuensi alamiah dari tingkat produksi yang tinggi. Hal ini juga kian menegaskan bahwa ekonomis Islam sangat mendorong agar uang dan sektor riil saling berinteraksi. Chapra (2000b) menceritakan, dimasa lalu, setelah Islam menghapus riba dan mengorganisasi keseluruhan produksi dan perdagangan berdasarkan *mudharabah* dan *syirkah*, kegiatan ekonomi di dunia Islam saat itu mengalami peningkatan kemakmuran. Kemampuan mengkombinasi beberapa faktor politik dan ekonomi, termasuk kemampuan memobilisasi sumber-sumber daya finansial yang memadai,

menjadi faktor utama bagi kemakmuran ini. *Mudharabah* dan *Syirkah* adalah dua metode mobilisasi yang menjadikan perdagangan dan industry sebagai keseluruhan mata air sumber moneter bagi dunia Islam abad pertengahan.

Beberapa hari lalu, Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda mewakili Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Inklusi Keuangan dalam acara Indonesia Fintech Festival & Convergence di ICE, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan. Ia mengatakan bahwa program inklusi keuangan Laku Pandai atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif merupakan salah satu program yang baik. Menurut Ratu Maxima, inklusif keuangan dapat mendukung pembangunan ekonomi berbasis masyarakat sekaligus mengurangi kemiskinan.

Jadi berdasarkan pernyataan Ratu Maxima, dapat dikatakan bahwa jika Indonesia bisa menyukseskan inklusi keuangan, Indonesia bisa menjadi berkembang dengan pesat dan menjadi contoh bagi banyak negara. Di sisi lain keuangan Islam membahas masalah “inklusi keuangan” atau “akses pembiayaan” dari dua arah. Pertama, melalui promosi kontrak pembagian resiko yang menyediakan alternatif untuk pembiayaan berbasis utang. Kemudian kedua melalui instrument spesifik redistribusi kekayaan antar masyarakat.

### **METODE PENELITIAN**

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis media massa. Literatur yang digunakan umumnya berupa textbook, buku ajar, dan jurnal studi ekonomi dan keuangan Syariah. Media yang digunakan adalah media massa, cetak maupun online.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Keuangan Inklusif Dampaknya Pada Makro Ekonomi Syariah & Konvensional**

Sebuah system keuangan yang efisien dan inklusif akan memberdayakan individu, memfasilitasi pertukaran barang dan jasa, mengintegrasikan masyarakat dengan perekonomian, serta memberi perlindungan terhadap guncangan ekonomi. Tujuan utama dari inklusi keuangan adalah dalam rangka mengentaskan kemiskinan dengan menumbuhkan usaha mandiri, yakni ketika masyarakat kecil mendapat kemudahan akses layanan perbankan, salah satu contohnya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa dijadikan sebuah model dalam inklusi keuangan.

Mengapa KUR? Karena salah satu tujuan dari KUR adalah memberikan akses kemudahan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk mendapatkan akses pembiayaan. Salah satu program kerja dari Pemerintah adalah layanan jasa keuangan. Apalagi, sebagai negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau. Saat ini ada ketimpangan yang sangat tinggi dalam jumlah bank/kantor dengan jumlah penduduknya antara Pulau Jawa dan Pulau di luar Jawa, juga antara kota dan desa.

#### **Keuangan Mikro Islam yang Membumi**

Dukungan kepada kegiatan ekonomi produktif dapat dilakukan melalui pemberdayaan kemampuan UMKM, pengembangan ekonomi daerah, dan penguatan sektor ekonomi prioritas. Tentunya hal tersebut membutuhkan sebuah tim atau forum yang mampu merumuskan dan merangkul seluruh pihak untuk bahu membahu mempercepat akses keuangan di daerah dalam

rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif, dan unklusif. Dalam hal ini peran keuangan mikro syariah menjadi sangat penting dan strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Konsep keuangan mikro Islam menganut prinsip-prinsip Islam dan merupakan bentuk investasi yang memiliki tanggung jawab social. Investor yang menggunakan kekakyaan mereka untuk proyek-proyek yang halal dan baik. Proyek –proyek tersebut termasuk zakat, amal yang didasarkan, atau proyek-proyek perdagangan dan industry untuk mengembangkan perekonomian suatu negara. Keuangan mikro Islam memberikan investor kesempatan untuk terlibat dalam proyek-proyek berharga yang pada dasarnya dapat memainkan peran penting dalam penargetan kemiskinan dan mengurangnya di banyak negara di dunia. Keuangan mikro Islam bergantung pada penyediaan jasa keuangan di daerah miskin atau berkembang yang sesuai dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh hukum Islam. Hal tersebut merupakan penggabungan dari dua sektor yang tumbuh, yaitu keuangan mikro dan industry keuangan Islam.

### Tantangan Kolaborasi Program Inklusi Keuangan dan Keuangan Mikro Islam dalam Mencapai Sasaran Pembangunan Berkelanjutan

Meskipun dampak positif dari keuangan mikro Islam di banyak negara Muslim, debitur masih didominasi oleh sektor tradisional. Sayangnya, sebagian besar dari sektor ini menghadapi lebih banyak tantangan di sebagian besar negara. Tantangan-tantangan ini tidak terbatas pada infrastruktur dasar, infrastruktur keuangan, dan pasar yang tidak terjangkau. Tantangan-tantangan ini telah berdampak negative terhadap aksesibilitas keuangan mikro Islam dengan menaikkan biaya keuangan di banyak negara. Tantangan lain yang dihadapi keuangan mikro Islam di banyak negara adalah biaya tinggi dan keberisikoan pembiayaan peminjam berpendapatan rendah. Hal ini berasal dari ukuran kecil dari keuangan mereka, daerah pemukiman terpencil dari kota urban, dan risiko tanpa agunan mereka.

Kelemahan infrastruktur keuangan mikro syariah meliputi penyebaran terbatas lembaga keuangan Islam dan peraturan keuangan yang relevan, dan tersedianya lembaga keuangan mikro Islam populer atau efektif dalam menjalankan program sasaran pembangunan berkelanjutan di banyak negara.

### Penerapan Kolaborasi Program Keuangan Inklusi Dengan Keuangan Mikro Islam Melalui Keterhubungan Antar Lembaga di Masyarakat

Penerapan program inklusi keuangan dapat menggunakan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT dan memanfaatkan jaringan masjid, *Islamic Center*, sekolah asrama Islam, dan universitas, sebagai saluran distribusi pengembangan keuangan inklusi syariah. Dengan adanya keterhubungan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses terhadap keuangan. Di sisi lain dalam tata kelola pengelolannya, jika sumber daya masjid dan lembaga pendidikan menjadi “agen perubahan” dalam menolong masyarakat agar memperoleh penghidupan yang layak dengan cara memberikan akses terhadap produk keuangan mikro Islam. Hal tersebut juga akan menghemat biaya administrasi dan biaya operasional lainnya karena dilakukan secara kultural.

Pada akhirnya keuangan inklusif yang berkolaborasi dengan keuangan mikro Islam tidak hanya terbatas dengan cara melalui akses terhadap layanan keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pension dan fasilitas pembayaran lainnya, tetapi juga dapat menyelesaikan permasalahan

kemiskinan di masyarakat. Dengan demikian nantinya di masyarakat akan tercipta pasar dengan sendirinya karena menerapkan *muamalah* atau perlakuan yang benar terhadap orang lain.

Pasar yang telah tercipta dengan sendirinya itu, nantinya akan menjadi jantung bagi perekonomian yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dengan memobilisasi tabungan, menyediakan kredit untuk bisnis, manajemen risiko, dan akselerasi dunia usaha dengan menyediakan fasilitas transfer dan pembayaran yang mudah.

Kebijakan Otoritas Ekonomi, Otoritas Fatwa (DSN) dan Pelaku Ekonomi

Dalam mengelola perekonomian negara, maka kebijakan otoritas fiscal dan moneter merupakan ujung tombak yang tidak bisa terpisahkan. Keduanya harus saling bersinergi dan bekerja simultan. Salah satu program yang patut menjadi prioritas bagi otoritas moneter dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan di Indonesia adalah *financial inclusion* dengan mengedepankan *financial literacy* sebagai sarana edukasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Di Indonesia, tingkat *financial literacy* masih sangat rendah bila disbanding negara-negara sekawan Asia Tenggara. *World Bank* tahun 2009 mencatat hanya sekitar 33% penduduk di Tanah Air yang sudah bersentuhan dengan Bank. Bila lebih di khususkan ke usia produktif, jumlahnya menurun menjadi hanya 20%. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, upaya untuk meningkatkan *financial literacy* di Indonesia membutuhkan kerja yang lebih keras, berkesinambungan, dan waktu lebih panjang. Hal ini juga sekaligus mengindikasikan bahwa Indonesia masih memiliki potensi yang besar bagi industry keuangan, utamanya perbankan untuk mengelolanya, terlebih dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk perbankan tahun 2020.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hal tersebut, maka Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter meyakini program NSFI dalam kurun lima tahun sejak pencanangannya merupakan cara utama untuk meningkatkan *financial literacy* guna peningkatan kemampuan individu dalam mengelola keuangannya. Sebagai bagian dari *financial inclusion*, maka sektor perbankan sebagai mayoritas kegiatan jasa keuangan di Indonesia menhadi *frontliner* bagi program tersebut. Strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan *financial inclusion* meliputi lima pilar, yaitu edukasi keuangan, meningkatkan eligibilitas keuangan, regulasi yang mendukung, peningkatan fasilitasi intermediasi, serta reformasi kebijakan yang meliputi perlindungan nasabah, *agen banking*, dan *phone banking*.

Ke depan, industry keuangan, utamanya perbankan, harus memetakan potensi masyarakat dan sektor usaha menjadi sasaran dari program *financial inclusion*. Apalagi, seiring dengan bertambahnya jumlah masyarakat kelas menengah serta masih dominannya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum mengakses perbankan, maka dibutuhkan keberpihakan dan strategi yang komprehensif dari industry keuangan untuk memperluas akses layanan jasa bagi masyarakat, utamanya dalam mempersiapkan produk-produk yang dapat memenuhi kebutuhan tabungan dan investasi bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- BI, 2011. *Gerai Info*. Edisi XV. Juni 2011. Tahun 2. Newsletter Bank Indonesia (BI).
- Brodjonegoro, Bambang S., 2013. *Branchless Banking Model: A Financial Inclusion Program*. Sebuah paper yang dipresentasikan di pertemuan G 20 di Rusia. Diakses dari [g20russia.ru/load/780988296](http://g20russia.ru/load/780988296).
- Haritsi, Jaribah bin Ahmad Al-, 2006. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*. Terjemahan dari Al-Fiqh Al-Iqtishadi : Li Amiril Mukminin Umar ibn Al-Khathathab. Cetakan Pertama, Jakarta: KHALIFA. Oktober.
- Hatta, Mohammad, 1963. *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*. Jakarta: Djambatan. Hlm. 1-29.
- Perwataatmadja, Karnaen A. & Anis Byarwati, 2008. *Jejak Rekam Ekonomi Islam*. Cetakan Pertama. Jakarta : Cicero Publishing. Februari.
- Sumber Internet :
- <http://archive.bisnis.com/articles/financial-inclusion-ke-depan-praktiknya-dipimpin-pemerintah>.

## Profil Penulis

**Dr Efrita Norman SSos MM (GS ADpaVbgAAAAJ&hl)** adalah Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Bogor dan dosen Pascasarjana IAI Nasional Laa Roiba dan Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor. Sebelumnya dia juga menjadi dosen ekonomi dan keuangan syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam INAIS Bogor maupun Program Pascasarjana INAIS.

Lahir di Padang 10 September 1975, Efrita Norman pernah menjadi sebagai Ka Prodi Perbankan Syariah FEBI INAIS dan Sekretaris Pascasarjana INAIS, Efrita adalah praktisi bisnis bidang *fashion* dan asesoris. Selain mengajar dia juga aktif sebagai pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) dan Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam (Fordebi), Ikatan Alumni Magister Manajemen UIKA, UMKM UIKA, dan DPP Al-Ittihadiyah.

Lektor manajemen ini menamatkan studi S-1 di Fisip Universitas Andalas Padang, Ibu tiga anak ini menyelesaikan S-2 Magister Manajemen UIKA dan S-3 Pendidikan Islam. Keduanya UIKA Bogor. Di sela-sela kesibukannya sebagai dosen dan pebisnis, dia juga aktif sebagai narasumber dan trainer berbagai kegiatan. Antara lain dalam kegiatan MES, IAEI, OJK, Asuransi Syariah, Pasar Modal maupun Asian Games dan Asian Paragames 2018.

